

**ANALISIS PERATURAN DAERAH DITINJAU DENGAN TEKNIK PENYUSUNAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
(Studi Di Provinsi Kalimantan Barat)**

OLEH :

**ODILO KELEBIT TITE,SH
A.2021131035**

ABSTRACT

This thesis discusses the analysis of local regulations are reviewed by the engineering drafting legislation "(studies in the province of West Kalimantan). From the results of this thesis can be concluded that the construction of regional regulations in West Kalimantan Province as opposed to the technique of preparation of legislation occurs in the system preparation and formulation of words / phrases, sentences in the title, opening, position forming local regulations, the preamble, by law, the dictum, torso, general provisions, the material is set, the formulation of the criminal provisions, the transitional provisions, and provisions cover, as well as disagreement on the cover, even in substance the regional regulation in the Articles of certain problematic of the substance of legislation higher. That regional regulations exist in West Kalimantan Province as opposed to the technique of preparation of legislation remain in place for formal legally Regional Regulation remains valid because it is formed, defined by regulatory authorities and has been promulgated in the Regional Gazette, but in substance the provisions contrary with legislation of higher void. Still the implementation of the Regional Regulation is problematic due to several factors, among others, Human Resources (HR) personnel who spearhead / leading sector forming regional regulations mastered design techniques Regional Regulation / legal drafter is still low, the level of awareness and attention of observers and investigators problem Regulations undangandalam establishment of Regional Regulation is still low and the lack of budget allocated in the formation of regional regulation. This thesis discusses the analysis of local regulations are reviewed by the engineering drafting legislation "(studies in the province of West Kalimantan). From the results of this thesis can be concluded that the construction of regional regulations in West Kalimantan Province as opposed to the technique of preparation of legislation occurs in the system preparation and formulation of words / phrases, sentences in the title, opening, position forming local regulations, the preamble, by law, the dictum, torso, general provisions, the material is set, the formulation of the criminal provisions, the transitional provisions, and provisions cover, as well as disagreement on the cover, even in substance the regional regulation in the Articles of certain problematic of the substance of legislation higher. That regional regulations exist in West Kalimantan Province as opposed to the technique of preparation of legislation remain in place for formal legally Regional Regulation remains valid because it is formed, defined by regulatory authorities and has been promulgated in the Regional Gazette, but in substance the provisions contrary with legislation of higher void. Still the implementation of the Regional Regulation is problematic due to several factors, among others, Human Resources (HR) personnel who spearhead / leading sector forming regional regulations mastered design techniques Regional Regulation / legal drafter is still low, the level of awareness and attention of observers and investigators problem Regulations undangandalam establishment of Regional Regulation is still low and the lack of budget allocated in the formation of regional regulation. Recommendation: The need assessment / further analysis of the regional regulations in West Kalimantan province, both from the juridical aspect, sociological, philosophical, and technical drafting process and substance of the material muatanperaturan area, so after being a Regional Regulation, becoming Regional Regulation effective, not cause contradictions and problems of both aspects of Mechanical Drafting, formal and material as well as meet the needs and demands for social justice. Because the purpose of the establishment of Regional Regulation not only to the rule of law / rechmatigheid alone but also so that people know and should be implemented in order to benefit / dooelmatigheid for the community. In The Local Regulation in the province of West Kalimantan involve the participation of the wider community, especially students of law,

Researcher law, legal experts from academics and designers Laws Invitation / legal drafter, because the public has the right to provide input verbal and / or written the establishment of regulatory legislation, as stipulated in Article 96, Article 98 and Article 99 of Law Number 12 Year 2011 on the establishment Regulation legislation that regional regulations have been enacted that will not be problematic.

Keywords: analysis, local regulations, in terms of, preparation techniques.

ABSTRAK

Tesis ini membahas analisis peraturan daerah ditinjau dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan” (studi di provinsi kalimantan barat). Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa konstruksi Peraturan Daerah yang ada di Provinsi Kalimantan Barat yang bertentangan dengan teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan terjadi pada sistem Penyusunan dan perumusan kata/rasa, kalimat pada bagian judul, pembukaan, jabatan pembentuk peraturan daerah, konsideran, dasar hukum, diktum, batang tubuh, ketentuan umum, materi yang diatur, rumusan ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup, serta pertentangan pada penutup, bahkan secara substansi Peraturan Daerah tersebut dalam Pasal-Pasal tertentu bermasalah dari materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Bahwa Peraturan Daerah yang ada di Provinsi Kalimantan Barat yang bertentangan dengan teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan tetap diterapkan karena secara legal formal Peraturan Daerah tetap sah karena dibentuk, ditetapkan oleh lembaga yang berwenang dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah, namun secara substansi ketentuan-ketentuan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi batal demi hukum. Masih diterapkannya Peraturan Daerah yang bermasalah tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang menjadi ujung tombak */leading sector* pembentuk Peraturan Daerah yang menguasai teknik perancangan Peraturan Daerah/legal drafter masih rendah, tingkat kesadaran dan perhatian Para pemerhati dan peneliti masalah Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Daerah masih rendah serta kurangnya Anggaran yang dialokasikan dalam pembentukan Peraturan Daerah. Rekomendasi : Perlunya pengkajian/analisis lebih lanjut terhadap Peraturan Daerah yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, baik dari aspek yuridis, sosiologis, filosofis, dan teknik penyusunan serta substansi materi muatan peraturan daerah, agar setelah menjadi Peraturan Daerah, menjadi Peraturan Daerah yang efektif, tidak menimbulkan pertentangan dan permasalahan baik dari aspek Teknik Penyusunan, formil dan materil serta memenuhi kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat. Karena tujuan dari dibentuknya Peraturan Daerah tidak hanya untuk kepastian hukum/*rechmatigheid* saja akan tetapi juga agar masyarakat tahu dan harus dilaksanakan dengan tujuan untuk kemanfaatan/*doel matigheid* bagi masyarakat. Dalam Perancangan Peraturan Daerah yang ada di Provinsi Kalimantan Barat melibatkan peran serta masyarakat luas terutama para pemerhati masalah hukum, Peneliti hukum, para ahli hokum dari Akademisi dan para perancang Peraturan perundang Undangan/*legal drafter*, karena masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 96, Pasal 98 dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan agar Peraturan Daerah yang telah diundangkan tersebut nantinya tidak bermasalah.

Kata Kunci : Analisis, Peraturan Daerah, Ditinjau Dari, Teknik Penyusunan.

LatarBelakang

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah menyebabkan perubahan yang mendasar dalam tata kelola pemerintahan di daerah, baik pemerintahan di tingkat provinsi, kabupaten/kota di Indonesia dalam hal kewenangan pemerintahan daerah mengurus daerahnya sendiri.

Kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan sendiri sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, secara hirarki merupakan implementasi secara yuridis dari Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 NKRI setelah amandemen kedua, yang berbunyi: "Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Tujuan otonomi daerah pada hakekatnya adalah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri, dengan alasan bahwa Pemerintah Daerah yang lebih mengetahui keadaan dan kondisi di daerah. Namun demikian tidak semua kewenangan pemerintah pusat diserahkan kepada pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah pusat yang tidak diserahkan atau dilimpahkan kepada pemerintah daerah berdasar Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah meliputi : Politik Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan, Yustisi, Moneter dan Fiskal Nasional dan Urusan Agama.

Dengan adanya kewenangan untuk mengurus daerah sendiri berdasarkan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah, mengharuskan pemerintahan di daerah membentuk regulasi-regulasi dalam upaya melaksanakan roda pemerintahan di daerah yaitu dengan melahirkan peraturan daerah-peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah. Kewenangan pemerintahan daerah dalam membentuk peraturan daerah, mempunyai legitimasi/dasar yang kuat, yakni secara yuridis formal didasari dalam UUD 1945 pada Pasal 18 ayat (6), yang berbunyi: Pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Kemudian juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinah Daerah pada Pasal 136 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut: Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan bersama DPRD.

Pemerintahan Daerah yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal (18) ini bukan saja Gubernur, Bupati dan Walikota, akan tetapi termasuk di dalamnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Peraturan daerah yang dibentuk oleh Pemerintahan Daerah baik Gubernur, Bupati, Walikota bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada dasarnya mempunyai fungsi:

- a. sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah;
- b. merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. dalam fungsi ini, Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan, dengan demikian Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- d. sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- e. sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.¹

Kemudian, peraturan daerah merupakan fungsi yang bersifat atribusi maksudanya bahwa Peraturan daerah melekat kewenangan-kewenangan sebagaimana diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terutama dalam Pasal 136 yaitu:

- a. Menyelenggarakan pengaturan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- b. Menyelenggarakan pengaturan sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
- c. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- d. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan daerah yang dibentuk oleh Pemerintahan Daerah, apabila dilihat dari hierarki peraturan perundang-undangan atau kedudukannya, maksudnya jenjang tingkatan peraturan

¹ Dirjen Peraturan perundang undangan, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, Penerbit Caplet Project 2008. hlm. 7.

perundang-undangan, merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional, mengandung makna bahwa Peraturan daerah tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum nasional, dimana keberadaan atau keabsahannya Peraturan Daerah jelas ada landasan hukumnya yaitu ditempatkannya Peraturan Daerah secara terhormat dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen,² sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian peraturan daerah secara hierarki juga diatur secara tegas dalam Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dimana dalam Pasal 7 ayat (1) menyebutkan : Jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan daerah dilihat dari jenis dan hierarki sebagaimana tersebut di atas menunjukkan bahwa peraturan daerah kabupaten/kota menduduki strata paling rendah dari peraturan perundang-undangan. Termasuk dalam peraturan daerah berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf a, yaitu Qanun yang berlaku di Daerah Provinsi Aceh Darussalam dan Perdasus serta Perdasi yang berlaku di Provinsi Papua.

Peraturan daerah merupakan penyelenggaraan dari ketentuan- ketentuan atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan yang lebih tinggi, hal ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 136 ayat (3), yang berbunyi: Perda sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing masing daerah.

Peraturan Daerah bisa juga pelaksanaan dari peraturan menteri, peraturan menteri itu lebih tinggi dari peraturan daerah, oleh karena peraturan daerah lingkup berlakunya terbatas pada daerah yang bersangkutan, sedangkan peraturan menteri ruang berlakunya mencakup seluruh

² H.M. Aziz, *Dasar Dasar Konstitusional Pemerintah Daerah Dan Pembentukan Peraturan Daerah*. Makalah disampaikan pada pendidikan dan pelatihan penyusunan perancangan peraturan perundang undangan, bulan Juni tahun 2010 di Jakarta Hlm 4.

wilayah Negara Republik Indonesia, maka secara hierarki, peraturan menteri berada di atas peraturan daerah, meskipun peraturan menteri tidak secara tegas dicantumkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Akan tetapi implisit diakui sebagai salah satu jenis peraturan perundang undangan.

Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia telah Menetapkan di dalam Surat Edaran Nomor M.UM.01.06-27 yang menyatakan bahwa Keputusan Menteri yang bersifat mengatur merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan, dan secara hierarki terletak diantara Keputusan Presiden dan Peraturan Daerah³. Namun demikian hal tersebut untuk saat ini tidak menjadi landasan yang kuat karena Surat Edaran tersebut dikeluarkan tanggal 23 Pebruari 2001 sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang sebagaimana telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Selain dari itu peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga resmi lainnya tetap diakui sebagai Peraturan Perundang-undangan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi:

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup Peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, kepala Desa atau yang setingkat.”

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) di atas, maka dapat dinyatakan bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga, badan atau komisi berupa peraturan dimasukkan dalam jenis peraturan perundang-undangan. Hal ini tentu dapat menimbulkan kesulitan menentukan hierarkinya karena peraturan yang dibentuk oleh suatu badan negara yang diberikan

³ Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta 2007. hlm 94

atribusi kewenangan membentuk peraturan yang mengikat umum belum secara tertulis dimasukkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut Peraturan Daerah secara yuridis ruang lingkup keberlakuannya terbatas pada daerah yang bersangkutan dalam suatu wilayah tertentu. Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan Undang-Undang, maka peraturan daerah itu harus jelas dalam pengertian tidak menimbulkan multi tafsir karena merupakan penjabaran dan implementasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah seharusnya tidak lagi menimbulkan banyak penafsiran dari kaidah dan ketentuannya, karena sudah bersifat teknis, jelas dan tinggal diterapkan di lapangan.

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana disebutkan di atas tidak terlepas juga dari tugas pemerintah daerah untuk membina dan menciptakan kesejahteraan masyarakat daerah. Oleh karena itu Peraturan Daerah yang dibuat haruslah sesuai dengan keadaan dan kondisi masyarakat di mana peraturan daerah tersebut diberlakukan.

Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota harus mengandung asas-asas materi muatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 138 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu materi muatan asas :

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantara;
- f. Bhineka Tunggal Ika;
- g. Keadilan Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum Dan Pemerintahan;
- h. Ketertiban Dan Kepastian Hukum; Dan/Atau
- i. Keseimbangan ,Keserasian ,Dan Keselarasan.

Namun demikian, berdasarkan pengamatan sebagaimana dikemukakan di atas pada kenyataannya sampai saat belum banyak Peraturan Daerah sesuai yang diharapkan, yang demikian ini ditunjukkan dengan adanya ribuan peraturan daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang sudah dibatalkan/direvisi oleh Pemerintah Pusat karena menimbulkan permasalahan-permasalahan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan data resmi Departemen Dalam Negeri dari tahun 2002 sampai tahun 2007, Peraturan Daerah yang dibatalkan adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2002 : 19 Peraturan Daerah;

2. Tahun 2003 : 105 Peraturan Daerah;
3. Tahun 2004 : 236 Peraturan Daerah;
4. Tahun 2005 : 136 Peraturan Daerah;
5. Tahun 2006 : 114 Peraturan Daerah;
6. Tahun 2007 : 173 Peraturan Daerah.⁴

Secara legalitas, dasar hukum pembatalan Peraturan Daerah tersebut termuat di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dalam Pasal 145 ayat (2), yang berbunyi "Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum dan /atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah. Akan tetapi hal ini apabila dilihat dalam hal kesetaraan tidak seimbang, karena pemerintah secara sepihak mempunyai kewenangan untuk membatalkan Peraturan Daerah, padahal Peraturan Daerah tersebut jelas diatur di dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, dengan jelas menyatakan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan lainnya untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak diatur secara jelas (tersurat) bahwa pemerintah pusat diberi kewenangan membatalkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya di daerah.

Seharusnya pembatalan Peraturan Daerah oleh pengadilan yang netral dalam hal ini Mahkamah Agung melalui Pengujian Judicial (judicial review)⁵ karena secara yuridis konstitusional ada dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang. Hal tersebut pun sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi: "Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, Pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung".

Berdasarkan pengamatan Penulis masih dijumpai Peraturan Daerah di Provinsi Kalimantan Barat, yang bermasalah atau bertentangan dari aspek sistematika teknik penyusunan Peraturan Daerah yaitu bermasalah dalam teknik dan metode perumusannya,

⁴Dirjen Peraturan Perundang Undangan, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, Penerbit Caplet Project 2008. hlm. vii

⁵ H.M. Aziz, *DasarDasarKonstitusional,Op.cithlm 9*

penggunaan bahasa hukum, logika hukum dan ketentuan normatifnya maupun dari aspek substansinya yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat tersebut antara lain yaitu:

1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Daerah yang ada di Kalimantan Barat tersebut di atas bermasalah pada aspek teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, banyak yang belum sesuai dengan teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan pada aspek substansi bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Padahal tujuan dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah agar ada tatanan yang tertib untuk membentuk Peraturan Perundang-undangan, baik berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan, pemberlakuannya maupun substansinya agar ada pola, bentuk suatu ketentuan yang baku mengenai tata cara pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Aspek-aspek di dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang bermasalah atau bertentangan menurut penulis yaitu pada aspek teknik penyusunan dan aspek substansinya.

Pada aspek teknik penyusunan permasalahan yang ada, yaitu pada bagian dari kerangka Peraturan Daerah baik itu pada Judul, Pembukaan Batang tubuh, Penutup, Penjelasan maupun pada Lampiran. Sedangkan pada aspek substansinya masih ditemui muatan materi atau isi Peraturan Daerah yang bertentangan dengan asas-asas pembentukan Peraturan Daerah yang baik dan substansi materi muatan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sebagai akibatnya Peraturan Daerah yang bermasalah tersebut tidak efektif dan tidak mencapai sasaran sebagaimana tujuan yang diinginkan oleh pembentuk Peraturan Daerah tersebut. Hal tersebut sangat merugikan baik dari aspek finansial, tenaga dan waktu yang telah dikeluarkan baik Pemerintah daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di dalam membuat Peraturan Daerah tersebut. Di samping itu banyak berpengaruh terhadap pemerintahan

di daerah itu sendiri, akan banyak program dan rencana pemerintah daerah yang seharusnya tercapai menjadi terhambat oleh karena banyaknya Peraturan Daerah yang bermasalah.

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut di atas menarik untuk dilakukan pengkajian/penelitian lebih lanjut terhadap Peraturan Daerah yang ada di Provinsi Kalimantan Barat yang bermasalah atau bertentangan yaitu dari perspektif teknik penyusunannya, yakni dalam persepektif legislatif drafting peraturan daerah yang terkait dengan masalah-masalah teknik dan metode perumusannya, penggunaan bahasa hukum, logika hukum dan ketentuan normatif dalam peraturan daerah berdasarkan Peraturan Perundang undangan. Pengkajian/penelitian Peraturan daerah ini didasari keinginan adanya Pembentukan Peraturan Daerah yang baik.

Permasalahan

Mengapa Peraturan Daerah yang ada di Provinsi Kalimantan Barat yang bertentangan dengan teknik Penyusunan Peraturan Perundang undangan yang ada tetap diterapkan?

Pembahasan

Peraturan Daerah di Provinsi Kalimantan Barat yang bertentangan atau bermasalah dari aspek tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan masih tetap diterapkan atau diberlakukan. Adalah menjadi penting untuk mengetahui mengapa Peraturan Daerah yang bertentangan, bermasalah tersebut masih diterapkan dan belum diupayakan untuk diadakan perubahan atau revisi oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat .

Pertentangan atau permasalahan yang ditemukan yakni pertentangan dari aspek judul, pertentangan atau bermasalah dari aspek pembukaan yang meliputi frase Dengan Rahmat Tuhan Yang maha Esa, jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan, konsideran, dasar hukum, diktum, pertentangan dari batang tubuh meliputi permasalahan atau permasalahan pada ketentuan umum, materi pokok yang diatur, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup dan permasalahan pada bagian penutup.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyebutkan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain dari itu, Peraturan Daerah juga dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.⁶Berkaitan dengan hal tersebut, maka semua Peraturan Daerah tak terkecuali Peraturan Daerah di Provinsi Kalimantan Barat tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Untuk menghindari pertentangan yang timbul didalam teknik penyusunan Peraturan Daerah, maka yang menjadi dasar hukum secara yuridis formal di dalam hal teknik penyusunan Peraturan Perundang-Undangan adalah Pasal 64 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang tertulis sebagai berikut:

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan sesuai dengan tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan terhadap teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

Berkaitan dengan itu, maka didalam pembentukan Peraturan Daerah di Provinsi Kalimantan Barat, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 menjadi dasar yang harus dipedomani yang jelas mengatakan Bahwa lampiran II dari Undang-Undang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Hal tersebut menjelaskan bahwa kedudukan Lampiran II dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah menjadi satu kesatuan dengan Undang-Undang ini dan mempunyai kedudukan yang sama dengan Undang-undangnya. Maka di dalam

⁶ Isi Pasal 136 ayat 4 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah .

pembentukan Peraturan Daerah di Provinsi Kalbar, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 haruslah menjadi acuan, pedoman dan landasan secara yuridis di dalam teknik penyusunan Peraturan Daerah.

Secara normatif teknik penyusunan Peraturan Daerah di Provinsi Kalimantan Barat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun kenyataannya setelah dianalisis ditemui pertentangan/ permasalahan dari aspek teknik penyusunan Peraturan Daerah sebagaimana yang ditentukan di dalam Peraturan Perundang-Undangan. Selanjutnya yang perlu diketahui adalah bagaimana akibat hukum dari penerapan Peraturan Daerah yang bermasalah dari aspek tehnik penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan mengapa masih tetap diterapkan.

Peraturan Daerah di Provinsi Kalimantan Barat yang sudah ditetapkan dengan ditandatangani oleh Gubernur dan Bupati di Provinsi Kalimantan Barat secara Hukum Administrasi Negara adalah sah menjadi salah satu Peraturan Perundang-Undangan, karena telah ditandatangani oleh Gubernur dan Bupati. Gubernur dan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan memiliki kewenangan atribusi yang melekat pada jabatan tersebut yang salah satunya adalah menetapkan Peraturan Daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD⁷, Peraturan Daerah di Provinsi Kalbar itu secara formal menjadi Sah dalam hal ini bila telah ditandatangani oleh Kepala Daerah sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam Pasal 80 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana tertulis; "Ketentuan mengenai penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79 berlaku secara mutatis dan mutandis terhadap penetapan Peraturan Daerah kabupaten/Kota." Pada Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) tertulis :

"(1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah provinsi tersebut disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur"

(2) Dalam Hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak di tanda tangani oleh Gubrnur dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari

⁷ Isi pasal 136 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

sejak Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut sah menjadi Peraturan Daerah provinsi dan wajib diundangkan. “

Pasal tersebut diatas berarti mengandung makna bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui oleh DPRD Provinsi dan Gubernur. Berlaku juga ketentuan tersebut terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah di tanda tangani oleh Bupati/walikota, dan juga Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut setelah lebih dari 30 (tiga puluh) hari belum juga di tanda tangani oleh gubernur, sejak Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama, rancangan Peraturan daerah tersebut sah menjadi Peraturan daerah Provinsi.⁸ ketentuan aturan tersebut secara mutatis dan mutandis berlaku juga juga dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah baik itu Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan oleh Gubernur, Bupati/Walikota secara yuridis sah menjadi Peraturan Perundang-Undangan, Kemudian harus diundangkan di dalam Lembaran Daerah sebagaimana ketentuan yang mengaturnya, yaitu dalam Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan bahwa pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.

Fungsi Pengundangan adalah agar setiap orang mengetahuinya,⁹ artinya suatu Peraturan Perundang-undangan mempunyai kekuatan Hukum Mengikat, maksudnya meskipun suatu Peraturan Perundang-undangan itu secara materil belum diketahui oleh masyarakat, tetap masyarakat dianggap mengetahuinya. Dengan demikian diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi, setiap orang dianggap telah mengetahuinya dan Peraturan Perundang-undangan tersebut telah memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum. Ketika suatu Peraturan Perundang-Undangan tersebut telah diundangkan, tidak ada alasan bagi seseorang yang terkait dengan suatu Peraturan Perundang-undangan untuk mengelak atau

⁸ Isi Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁹ *Ibid* Pasal 81

menolak suatu Peraturan Perundang-Undangan dengan alasan tidak mengetahuinya, meskipun dalam hal berhubungan kebenaran materil hal tersebut masih dapat diperdebatkan.

Terhadap Peraturan Daerah yang ada di Provinsi Kalimantan Barat yang bermasalah dari aspek teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dari aspek keberlakuannya tidak ada pengaruh karena Peraturan Daerah yang ada di Provinsi Kalimantan Barat tersebut sah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Gubernur dan Bupati dan telah di undangkan dalam Lembaran Daerah, artinya Peraturan Daerah tersebut tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. Meskipun secara teknik terdapat permasalahan-permasalahan dari aspek tehnik perumusan terhadap undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Secara substansi bisa saja ketentuan Dalam peraturan Daerah tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tidak ada Pasal atau Ayat yang menyatakan bahwa apabila suatu Peraturan Perundang-Undangan bertentangan dalam teknik penyusunan Peraturan perundang-undangan dinyatakan batal, tidak sah, atau dinyatakan tidak berlaku. Kemudian didalam Undang-Undang tersebut tidak memuat ketentuan sanksi terhadap Peraturan Perundangan yang bertentangan dengan teknik penyusunan penyusunan peraturan perundang undangan. Namun demikian Peraturan Daerah yang bertentangan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tetap menjadi permasalahan karena secara Subtansi Peraturan daerah tersebut sudah Bertentangan dengan kaidah-kaidah atau ketentuan ketentuan yang seharusnya dipedomani dalam pembentukan Peraturan Daerah di Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sanksinya adalah apabila substansinya bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi , maka dapat dikesampingkan dan diuji materil pada Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut Pasal 9 ayat (2) yang berbunyi :”Dalam suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Secara toritis bahwa suatu peraturan Perundang-undangan apabila substansinya bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, maka peraturan yang lebih rendah tersebut dapat dikesampingkan. Dapat di kalahkan karena Peraturan Perundang

undangan yang lebih rendah merupakan penjabaran atau tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Kekuatan hukum suatu Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki dari Peraturan Perundang-undangan itu sendiri sebagaimana ketentuan yang mengatur hal tersebut di dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam hal Peraturan Daerah di Provinsi Kalimantan Barat yang bermasalah secara materil, materi muatan yang meliputi asas atau norma normanya dalam Peraturan Daerah di Provinsi Kalimantan Barat tersebut apabila bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka dapat dikalahkan/dikesampingkan. Karena kekuatan hukumnya dibawah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.¹⁰ Namun demikian secara formil apabila bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka keberlakuan Peraturan Daerah di Kalbar tersebut tetap Sah karena ditetapkan oleh Lembaga berwenang dalam hal ini ditetapkan Kepala daerah dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Peraturan Daerah yang bermasalah dalam aspek teknik Penyusunan, tidak dapat dibiarkan saja, karena hal ini bertentangan dari tujuan yang diinginkan oleh Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. ini didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional.¹¹ Oleh karena itu Peraturan Daerah di Provinsi Kalimantan Barat tidak boleh bertentangan baik dari aspek substansi materi maupun dalam aspek tehnik penyusunannya.

Selain dari itu apabila Peraturan Daerah bermasalah dari aspek teknik Penyusunan Peraturan perundang –undangan, maka tujuan yang diinginkan baik dari asas, materi muatan dari Peraturan Daerah tersebut tidak terarah tidak memenuhi sasaran, bahkan tidak mampu memenuhi apa yang diinginkan dari pembentuk Peraturan Daerah tersebut. Oleh karena itu didalam pembentukan Peraturan Daerah haruslah sesuai dengan ketentuan dan norma-norma yang telah diatur di dalam undang undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

¹⁰*Ibid*isi Pasal 7 ayat (2)

¹¹*Ibid*, isi Penjelasan umum

Hal lainnya yang perlu untuk diperhatikan adalah terhadap Peraturan Daerah yang bertentangan /bermasalah, masih tetap diterapkan dan diperlakukan dan sampai saat ini belum diperbaiki atau direvisi. Masih diterapkannya Peraturan Daerah yang bermasalah dari aspek teknik penyusunan Peraturan Daerah dapat disebabkan oleh :

1. Lemahnya sumber daya manusia di daerah yang bertugas dan berkaitan langsung dalam menangani penyusunan Peraturan Daerah.;
2. Lemahnya pembinaan dan sosialisasi dari pusat ke daerah mengenai Peraturan Perundang-Undangan;
3. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan Peraturan Daerah.¹²

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Sebenarnya Lemahnya Sumber Daya Manusia di daerah sebagai penyebab tetap diterapkannya Peraturan Daerah yang bertentangan atau bermasalah pada angka 1 (satu) Tidak tepat karena banyak SDM yang mampu, akan tetapi belum dimanfaatkan secara Optimal, kurangnya koordinasi dan kerja sama dengan Para Akademis dan peneliti dan pemerhati masalah Hukum. Begitu juga penyebab Kurangnya Keterlibatan masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Daerah pada angka 3 (tiga) diatas sebagai salah satu penyebab tetap diterapkannya Peraturan Daerah yang bermasalah, adalah kurang tepat, karena masyarakat itu banyak dan masyarakat yang mana, yang lebih tepat adalah para pemerhati masalah hukum dan kalangan para ahli dan peneliti yang berkaitan dengan Perundang-undangan.

Untuk Peraturan Daerah di Provinsi Kalimantan Barat yang bertentangan atau bermasalah namun masih diterapkan, berdasarkan penelitian penyebabnya selain sama dengan apa yang diuraikan di atas, akan tetapi juga disebabkan oleh :

1. ketidak tahuan bahwa Peraturan Daerah tersebut bermasalah,
2. menganggap bahwa Peraturan Daerah yang bermasalah tersebut tidak membatalkan Keberlakuannya
3. kurangnya dilibatkannya Para Peneliti, para ahli hukum dari kalangan akademisi Universitas Bengkulu dan Para perancang peraturan perundang-undangan/legar drafater dari kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu.

¹² DWI ANDAYANI BS. Permasalahan Hukum dalam perancangan Peraturan Daerah. Di sampaikan pada Diklat "Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan" di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia . pada tanggal 10 bulan Desember Tahun 2010.

4. Keterbatasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan untuk pembentukan Peraturan Daerah.

Kurangnya Anggaran di daerah ini menjadi Faktor utama penyebab lahirnya Peraturan daerah yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. *Leading sector* Bidang Hukum yang menangani dalam Pembentukan Rancangan Peraturan daerah, telah berupaya memasukkan usulan anggaran yang representatif dalam pembentukan daerah yang digunakan untuk penelitian Hukum di dalam pembuatan Naskah akademik Raperda yang melibatkan para ahli dan kalangan akademisi dan perancang Peraturan Perundang Undangan, namun usulan tersebut tidak diakomodasikan dalam Perda Anggaran Daerah. akibatnya Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak melalui kajian akademisi dan tidak melibatkan Pakar, ahli hukum dan legal drafter, sehingga Peraturan Daerah tersebut secara formal banyak Bertentangan dengan teknik Penyusunan Peraturan perundang-undangan dan secara substansi bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kesimpulan

Bahwa Peraturan Daerah yang ada di Provinsi Kalimantan Barat yang bertentangan dengan teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan tetap diterapkan karena secara legal formal Peraturan Daerah tetap sah karena dibentuk, ditetapkan oleh lembaga yang berwenang dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah, namun secara substansi ketentuan-ketentuan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi batal demi hukum. Masih diterapkannya Peraturan Daerah yang bermasalah tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang menjadi ujung tombak *leading sector* pembentuk Peraturan Daerah yang menguasai teknik perancangan Peraturan Daerah/legal drafter masih rendah, tingkat kesadaran dan perhatian Para pemerhati dan peneliti masalah Perundang-undangandalam Pembentukan Peraturan Daerah masih rendah serta kurangnya Anggaran yang dialokasikan dalam pembentukan Peraturan Daerah .

DaftarPustaka

- AA.Oka Mahendra ,*Permasalahan dan Kebijakan Penegakan Hukum*, (artikel) Jurnal Legislati, vol 1 no 4 Jakarta 2004;
- AA.Oka Mahendra, *Reformasi pembangunan hukum dalam perspektif peraturan Perundang Undangan*, Dep Hukum dan HAM, Jakarta. 2006.
- Ade Saptomo, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Empiris Murni Sebuah Alternatif*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009;
- Bambang Sunggono,*Metodologi Penelitian Hukum* cet 5, raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Dydiet Hardjito, *Pemecahan Masalah Yang Analitik Otonomi Daerah Dalam Kerangka NKRI*, Predana, Jakarta 2003.
- Harun Alrasid, *Naskah UUD 1945, Sesuadaha Empat Kali Diubah Oleh MPR*. Universitas Indonesia (UI Pres) Jakarta, 2007.
- L.C Van der Vlies, *Handboek Wetgeving*(Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang Undangan), Alih Bahasa Linus Doludjawa, Dirjen PP Jakarta, 2005.
- Jimly Asshiddigie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007.
- Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD Dan Kepala Daerah*, Alumni Bandung, ed. kedua cet. pertama Bandung, 2008.
- MA.Loth, *Recht Taal Een Kleine Metthodologie*(Bahasa dan hukum sebuah metodologi kecil, alih bahasa Linus Doludjawa), Dirjen PP Jakarta, 2007.
- Machmud Aziz, *Jenis Dan Hirarki Peraturan Perundang Undangan Menurut UUD RI Dan UU Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan* (artikel) , Jurnal Legislati, vol 1 no 4 Dirjen PP Jakarta, 2004.